

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sistem yang dianut oleh Bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem politik dan kenegaraan. Demokrasi di tiap-tiap negara di dunia ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, yang mana antara satu negara dengan negara lainnya mempunyai perbedaan di dalam menjalankan demokrasi tersebut dan di Indonesia demokrasi ini dilaksanakan sesuai dengan ideologi yang dianut bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

Walaupun di tiap-tiap negara berbeda dalam menjalankan demokrasi tersebut dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, namun menurut para ahli ilmu politik harus ada berbagai institusi dan kondisi bila mana sistem yang dijalankan oleh suatu negara biasa disebut sebagai sebuah sistem yang demokratis.

Salah satu institusi yang tidak bisa dilepaskan dari demokrasi modern ini adalah adanya partai politik yang saling berjuang untuk meraih kekuasaan. Dan sudah menjadi aksioma dalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis kalau terdapat partai-partai politik. Sebab, kehadiran partai politik berarti ada pengakuan warga negara untuk berbeda pendapat.¹

Di Indonesia, kehadiran partai politik telah mempunyai sejarah yang cukup panjang dimana telah dimulai sebelum negara Indonesia merdeka pada

tahun 1945. Kehadiran partai politik paska kemerdekaan bagaikan cendawan yang tumbuh dimusim hujan, ini dilatar belakangi oleh Maklumat Wakil Presiden No. X tertanggal 3 November 1945.

Puncak kehadiran partai politik tersebut adalah pemilihan umum pada tahun 1955 yang menghasilkan pemenang yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam perjalanan kepartaian selanjutnya yang menarik untuk dibahas adalah adanya keinginan dari rezim yang berkuasa untuk melakukan penyederhanaan terhadap sistem kepartaian yang ada. Sikap Soekarno sangat terkenal dengan sikapnya yang anti partai politik. Salah satu ucapannya yang cukup menghebohkan yaitu perlunya penguburan partai politik. Sikap inilah yang mendasari sikap-sikap Soekarno dalam penyederhanaan kepartaian pada awal tahun 1960-an.²

Jalan pikiran Soekarno dalam usaha penyederhanaan kepartaian adalah cukup sederhana, jumlah partai yang besar dengan ideologi yang berbeda dan bertentangan mau tidak mau akan menghasilkan konflik politik yang besar pula. Semakin hebat pertentangan ideologi-ideologi yang dianut oleh partai politik semakin hebat pula konflik politik diantara mereka. Soekarno melihat bahwa kunci kestabilan terletak pada penyederhanaan kepartaian dengan cara mengurangi jumlah partai yang ada. Dari sini terlihat bahwa jumlah partai

² Maswadi Rauf, *Masa Depan Pembangunan Politik Indonesia: Beberapa Masalah Organisasi Politik*, di dalam Alfian, Nazaruddin Sjamsuddin (ED), *Masa depan Kehidupan Politik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta 1988, hal 38.

adalah faktor penting dalam penyederhanaan kepartaian pada masa orde lama.³

Orde Baru mewarisi pemikiran Soekarno tentang penyederhanaan kepartaian. Partai politik yang tadinya berjumlah sepuluh buah setelah peristiwa G/30 S PKI dianggap masih terlalu banyak. Oleh karena itu fusi partai politik adalah sebuah keharusan.⁴ Fusi partai politik ini bias disebut juga dengan restrukturisasi politik oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu untuk mendukung dari program yang akan dilaksanakan.

Fusi partai pertama terlaksana pada 5 Januari 1973, yang terdiri dari partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), yang kemudian partai-partai ini mendeklarasikan diri menjadi sebuah partai baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai ini dikategorikan partai Islam.

Sedangkan fusi yang kedua terlaksana pada 10 Januari 1973 yang terdiri dari: Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Khatolik dan Partai Kristen Indonesia. Dari fusi kelima partai ini melahirkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai ini dikategorikan sebagai Nasionalis.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan mulainya masa reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, demokrasi dan tatanan politik Indonesia memasuki zaman baru, dimana tidak ada lagi

hambatan untuk mengemukakan pendapat secara bebas, mendirikan partai politik baru.

Hasil pemilihan umum 1999, Partai Persatuan Pembangunan berhasil meraih 58 kursi di DPR-RI atau setara dengan 12,56%, partai ini mendapatkan kursi di 24 propinsi atau 88,88% dari 27 propinsi. Pada sidang MPR 1999, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama partai Islam dan basis masa Islam lainnya bergabung didalam suatu koalisi poros tengah yang kemudian berhasil mendudukan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI menggantikan B.J. Habibie, namun ditengah perjalanan pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI, poros tengah tidak puas dengan kinerja pemerintah pada waktu itu. Pada akhir bulan Juli sampai awal Agustus 2001, MPR melalui sidang Istimewa menarik mandatnya atau memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI, dan pada sidang waktu itu juga MPR mengangkat Wakil Presiden Megawati sebagai Presiden RI dan juga mengangkat Hamzah Haz, ketua umum PPP yang terpilih pada Muktamar IV PPP November 1998 sebagai Wakil Presiden RI.

Pengangkatan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI tersebut merupakan babak baru bagi perjalanan PPP di dalam pentas politik Indonesia, sebab baru Hamzah Haz yang seorang kader PPP dalam meraih jabatan yang strategis dalam pemerintahan yakni Wakil Presiden.

Sedangkan pada pemilihan umum 2004, Partai Persatuan Pembanguna (PPP) hanya mendapatkan suara sebesar 9.248.764 atau sekitar 8.15% bearti

berjumlah 58 kursi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan posisi no tiga di bawah Partai GOLKAR, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan dari pemilihan presiden RI, Hamzah Haz yang berpasangan dengan Agum Gumelar berada di peringkat paling bawah, pasangan ini hanya mendapatkan 3.276.001 atau setara dengan 3.05% dari jumlah pemilih 107.403.020.

Sedangkan polehan suara PPP di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilihan umum 2004 untuk DPR-RI mendapatkan total suara di Kota Yogyakarta total suara PPP sebesar 11.300, di Kabupaten Sleman total suara PPP sebesar 34.697, di Kabupaten Bantul total suara PPP sebesar 23.493, di Kabupaten Kulon Progo total suara PPP sebesar 11.855, di Kabupaten Gunung Kidul total suara PPP sebesar 12.923, jadi total suara secara keseluruhan yang diperoleh oleh PPP sebesar 94.268 dari total suara sah yang sebesar 1.924.647.⁵

Sedangkan untuk DPRD-DIY, PPP mendapatkan suara di Kota Yogyakarta sebesar 11.454, di Kabupaten Sleman mendapatkan suara sebesar 6.729, di Kabupaten Bantul mendapatkan suara sebesar 16.843, di Kabupaten Kulon Progo 12.146, di Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan suara sebesar 12.191, total suara keseluruhan yang diperoleh PPP adalah 79.363, total suara yang didapatkan oleh PPP secara keseluruhan untuk DPRD-DIY sebesar 1.768.008.⁶

⁵ Sumber Data Website KPU [http://: www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)., dan data diolah.

⁶ Sumber Data Website KPU [http://: www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dan Pamflet KPUD DIY Rekapitulasi Suara

Kader di dalam partai politik sering di ibaratkan sebuah figura lukisan, yang mana sebuah lukisan tidak akan dapat tegak berdiri tanpa adanya sebuah figura. Seperti itu juga dengan partai politik, partai politik tidak akan pernah dapat berdiri tegak tanpa adanya kader-kader partai yang mumpuni.

Ketika Indonesia menapaki tangga reformasi, eforia politik ditunjukkan dengan menjamurnya jumlah partai-partai politik. Para elit-elit partai berlomba-lomba untuk merekrut kader-kader yang berkualitas yang mampu dijadikan tulang punggung partai, seperti para kyai, pendeta, tokoh masyarakat, intelektual kampus, praktisi bidang bisnis, hukum, wartawan. Meskipun semuanya tidak dapat dikatakan sebagai “kader lompatan”, tetapi realitas tidak bisa berbohong bahwa sebagian besar dari mereka adalah “kader karbitan”.⁷

Di dalam sebuah partai politik, kader adalah tulang punggung dan harapan masa depan partai. Karena itu, pendidikan dan pembinaan kader partai menjadi kunci keberhasilan perjuangan partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan dari beragam latar belakang, unsur, fungsi, profesi dengan demikian merupakan andalan partai yang perlu terus menerus memperoleh perhatian peluang, kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan bersama partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur, terencana dan terprogram secara sistematis. Arah pengembangan dititik beratkan agar kader partai adalah juga sekaligus sebagai kader bangsa, yang siap bertugas di lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan Negara dan di tengah-tengah masyarakat.

⁷ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi (Menakar Kinerja Partai Politik Era*

Peranan kader parpol sangat vital untuk membangun suatu kepemimpinan partai yang berkualitas. Bagaimanapun wajah parpol ke depan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya, yang pada gilirannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.

Sebagai partai politik yang sudah cukup lama berdiri, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah cukup sering melakukan sebuah regenerasi di dalam tubuh partai. Proses regenerasi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi partai politik tersebut di dunia perpolitikan nasional.

Untuk menjalankan proses regenerasi tersebut maka partai membutuhkan sebuah sistem pelatihan kader. Sistem pelatihan kader inilah yang nantinya akan digunakan dalam rekrutemen kader partai yang tangguh dan yang akan membangun dan menjalankan roda kepartaian yang akan datang.

Pada masa reformasi saat ini, partai politik diberikan kebebasan dalam menentukan ideologi partai. Ada partai politik yang mengandalkan ketangguhan ideologi yang dipilih untuk mengumpulkan massa dan dijadikan massa partai. Dan ada pula partai politik yang mengandalkan kekuatan kader yang dimiliki. Kekuatan kader dihimpun lewat mekanisme perekrutan yang kemudian diikuti dalam berbagai pelatihan secara berjenjang. Ada kader tingkat dasar, kader tingkat lanjutan, bahkan ada kader bangsa yang diproyeksikan sebagai calon negarawan.⁸

Sesuai dengan peran partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, maka partai politik memiliki tugas seperti :

1. Menyiapkan kader-kader/pimpinan politik.
2. Menyeleksi kader-kader yang dipersiapkan.
3. Memperjuangkan untuk menempatkan kader-kader yang berkualitas, berdedikasi, serta memiliki kredibilitas yang cukup tinggi.

Melihat peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, maka sudah menjadi sebuah kewajiban partai politik untuk melakukan sebuah proses pengkaderan didalam tubuh partai itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dirumuskan didalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimanakah Sistem Pelatihan Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP)”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menjelaskan secara objektif mengenai sistem pelatihan kader di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- b. Mengetahui sejauh mana keberhasilan pengkaderan didalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- c. Sebagai bentuk uji materi terhadap apa yang selama ini penulis peroleh di dalam dunia akademik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah dan mengetahui pemahaman mahasiswa tentang pelatihan kader dalam partai politik di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan referensi dalam memahami sistem pelatihan kader partai politik.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Selain penyelenggara pemilihan umum, partai politik sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan platform politik merupakan suatu keharusan dalam Negara yang demokratis. Banyak defenisi tentang partai politik yang dikemukakan oleh para ilmunan seperti :

1. Mirriam Budiharjo

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama, kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁹

2. Mark M. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam

rangkaian prinsip dan kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.¹⁰

3. Raymond Girfield Gettel

Partai politik terdiri dari sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.¹¹

4. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.¹²

5. Roger F. Soltau

Partai politik sebagai kelompok warga Negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.¹³

¹⁰ Mark M. Hagopian, dalam Ihlusul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.

¹¹ Raymond Girfield Gettel, dalam Ulung Pribadi, *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Politik*, UMY, 2001, hal 43.

¹² Carl J. Friedrich, dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 116.

6. Geovani Sartor

Partai politik adalah setiap kelompok politik yang dapat dikenali lewat label yang menempel pada partai politik tersebut dan mereka memiliki simbol-simbol yang biasanya muncul pada saat pemilu dan mereka mampu menempatkan calon-calon mereka dalam jabatan publik.

7. Haggue Harrop

Partai politik adalah dalam hal untuk menguasai pemerintah cukup menguasai hal-hal yang bersifat keputusan yang menentukan.

8. Jhon Canoy dan Henry

Partai politik adalah sebuah asosiasi yang dibentuk secara sukarela dan berusaha untuk mengendalikan pemerintahan dengan jalan ikut pemilihan dengan menempatkan orang-orang mereka.

9. Sthepen Tarsey

Partai politik adalah kelompok social yang berusaha menguasai sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah Negara dan biasanya cara-cara yang diambil lewat pemilu.

Dari beberapa defenisi mengenai apa itu partai politik, pada dasarnya partai politik memiliki beberapa unsur :

a. Partai politik adalah sekumpulan orang atau warga Negara yang

- b. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang mempunyai kesamaan cita-cita, tujuan dan orientasi.
- c. Partai politik mempunyai tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan kalau partai politik merupakan sebuah organisasi yang teratur dan mempunyai cita-cita, tujuan dan orientasi, yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan serta melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

b. Fungsi Partai Politik

Miriam Budiharjo menyebutkan, dalam Negara yang menganut paham demokrasi, partai politik menjalankan beberapa fungsi seperti :

1. Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam

3. Partisipasi politik

Kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. Memadu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

6. Pengendalian Konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

7. Kontrol Politik¹⁴

Kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dari isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari tujuh fungsi partai politik tersebut ada fungsi lainnya, yang mana fungsi tersebut lebih banyak dimengerti oleh halayak

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grafindo, Jakarta, 1992, hal. 116-121

umum dan juga disebut sebagai fungsi utama partai politik, adapun fungsi tersebut yaitu :

- a. Mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
- b. Mengumpulkan, mengorganisasi dan merumuskan aspirasi rakyat untuk diperintahkan oleh sistem politik.
- c. Menempatkan wakil-wakil yang dipandang cukup untuk mewujudkan aspirasi rakyat.¹⁵

c. Tugas Partai Politik

1. Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas untuk menambahkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
4. Partai politik bertugas mencari dan mengajak ikut serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu ikut serta dan

¹⁵ Riswanda Imawan, *Membedah Orde Baru*, CV. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 5.

setelah pemilihan umum. Dan ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan partai adalah kumpulan orang-orang didalam suatu organisasi yang berkerja untuk memanipulasi rakyat untuk kepentingan mereka semata. Adanya pemahaman masyarakat yang menyatakan partai politik semuanya sama, tidak dapat disalahkan namun secara teoritis tentu saja tidak dapat di benarkan sebab secara teoritis partai politik mempunyai tipologi sendiri-sendiri.

Ramlan Surbakti¹⁸ mengatakan bahwa tipologi partai politik adalah pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Lebih lanjut Ramlan Surbakti menjelaskan tipologi partai politik sebagai berikut:

1. Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Adapun ketiga ini adalah partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.

Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan dan juga mengubah program, kegiatan, dan

pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya.

Yang dimaksud dengan partai doktiner adalah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud seperangkat nilai politik yang dirumuskan politik yang dirumuskan dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Penggantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit dan partai ini terorganisasikan secara ketat.

Partai kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, dan lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintah. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi namun tak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat

2. Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Yang dimaksud partai politik massa adalah partai politik yang mengendalikan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan tujuan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lingkungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

Partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai politik kader biasanya sangat ketat yaitu, melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

Karena sifatnya yang demikian partai kader seringkali disebut partai

3. Basis Sosial dan Tujuan

Partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya dapat dibagi menjadi empat tipe. *Pertama*, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah. *Kedua*, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha. *Ketiga*, partai politik yang anggotanya pemeluk agama tertentu seperti Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. *Keempat*, partai politik bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Dalam kenyataannya, kebanyakan partai politik tidak hanya memiliki basis sosial dari kalangan tertentu, tetapi juga dari berbagai kalangan dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang diminan.

Berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga: *Pertama*, partai perwakilan kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. *Kedua*, partai pembinaan bangsa. Artinya, partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit. *Ketiga*, partai mobilisasi. Artinya, partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung

diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.¹⁹

f. Kategori Partai Politik berdasarkan Fungsi

Berkaitan dengan pembahasan aktualisasi partai politik, disini perlu juga diuraikan secara lebih jelas tentang jenis-jenis partai politik yang ada di Indonesia dan pengaruhnya terhadap efektivitas fungsi yang di jalankannya.

Sebab dengan melihat jenis-jenis partai politik ini kita dapat mengidentifikasi kecenderungan kinerja yang nantinya akan ditampilkan oleh masing-masing partai politik yang ada di Indonesia.

1. Partai Kader

Jenis partai ini berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas, partai ini kebanyakan anggotanya dari kelas menengah keatas, dan tidak memerlukan organisasi besar untuk memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan ideologinya rendah, sebab aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Karena penekanan partai kader sesungguhnya adalah terletak pada penguatan yang cukup tinggi pada level pengurusannya untuk kepentingan partai.

2. Partai Kepentingan

Partai ini merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh,

¹⁹ Ibid., hal 124.

agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai atau sistem dua partai berkompetisi.

3. Partai Doktriner

Jenis partai ini memiliki sejumlah program dan kegiatan secara kongkrit sebagai penjabaran ideologi, ideologi yang dimaksud disini adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongrit dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Ciri-cirinya partai ini pimpinannya tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai yang sudah dirumuskan secara kongrit dan terorganisasi secara ketat.

4. Partai Massa

Berkembangnya partai ini karena adanya perluasan hak pilih rakyat. Parpol ini dibentuk diluar parlemen (*ektraparlemen*). orientasinya pada basis pendukung seperti buruh, petani, pekerja, dan massa yang lainnya yang bertujuan pendidikan politik dan kemenangan pemilu.

5. Partai Proto

Partai proto merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen atau intraparlemen. Basis pendukungnya adalah kelas menengah keatas. Ciri dari partai

Partai proto merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol modern karena

hal yang paling menonjol dalam partai ini adalah perbedaan kelompok anggota dan kelompok non anggota dan faksi yang masih menonjol. Elite partai biasanya diisi oleh orang-orang kelas bangsawan.

6. Partai Catch-all

Jenis partai ini merupakan gabungan antara jenis partai kader dan partai massa, mereka berusaha menampung kelompok kepentingan dan penekan dan ideologinya tidak terlalu kaku, seperti halnya partai-partai pemenang pada pemilu 1999 masuk dalam jenis ini. Partai jenis ini tidak mengandalkan ideologi akan tetapi penguatan pada kuantitas basis massa meskipun demikian mereka juga melakukan kaderisasi pada internal elite pengurusnya. Sehingga konsekuensinya adalah proses pendidikan politik terabaikan.

7. Partai Diktatorial.

Partai jenis ini merupakan sub-tipe dari partai massa akan tetapi ideologinya bersifat kaku dan radikal. Cirinya terletak Pada kepemimpinan partai terdapat kontrol ketat, sehingga anggota partai dituntut untuk mengabdikan secara penuh. Tidak hanya ketat dalam hal kepemimpinan akan tetapi dalam hal rekrutmen dan kaderisasi anggotanya sangat dalam konteks konsistensi ideologi

g. Karakteristik Partai Politik

Maurice Duverger di dalam bukunya *political parties*, mengatakan bahwa mencapai perbedaan karakteristik partai-partai politik guna menangkap pengertian atau konsep partai politik itu sendiri, biasa dikatakan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik.

Untuk mencapai karakteristik partai-partai politik biasa dilakukan dengan meninjau segi organisasi, keanggotaan ataupun aspek kepemimpinannya. Dengan ini Duverger mencoba mengkalifikasikan partai-partai politik berdasarkan *direct structure* dan *indirect structure*.

1. Direct Structure

Keanggotaan seseorang dalam partai politik dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikuti diri dalam partai politik tertentu.

2. Indirect Structure

Keanggotaan seseorang dalam partai politik diperoleh berdasarkan keikut sertaannya dalam organisasi yang terikat kepada suatu partai politik tertentu, karena adanya kepentingan timbal balik.²⁰

2. Kader Partai

Kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Hal ini dapat dijelaskan, *pertama*, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. *Kedua*, seorang kader mempunyai komitmen yang terus-menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. *Ketiga*, seorang kader mempunyai bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. *Keempat*, seorang kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan "*social engineering*".²¹

Kader partai adalah anggota partai yang menjadi tenaga inti dan merupakan elemen aktif yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dan mampu memahami, meyakini, memelihara, dan memperjuangkan kebenaran cita-cita politik partai, serta mampu mempertahankan kelangsungan partai di masa depan, untuk mewujudkan cita-cita, visi, dan misi perjuangan partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²¹ Hasil-Hasil Kongres XXV Himpunan Mahasiswa Islam, Tema : "Membangun HMI Baru dan

Kader partai politik sering diibaratkan figura lukisan. Lukisan tidak bisa tegak, tanpa figura. Tanpa kader-kader yang mumpuni, partai politik akan tidak bisa berdiri tegak.

Kader partai adalah tulang punggung dan harapan masa depan partai. Untuk menjadikan kader partai sebagai sebuah harapan bagi partai untuk kedepan bukanlah sebuah perkara gampang, partai politik yang bersangkutan memberikan bekal-bekal yang harus dimiliki oleh seorang kader partai seperti pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kader partai menjadi kunci keberhasilan dalam perjuangan partai.

Kader-kader partai yang dari berbagai tingkatan dan dari beragam latar belakang unsur, fungsi, profesi merupakan andalan bagi partai yang perlu terus menerus memperoleh perhatian peluang, kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan bersama partai melalui pendidikan politik yang teratur, terencana dan terprogram secara sistematis. Arah pengembangan dititik beratkan agar kader partai adalah juga sekaligus sebagai kader bangsa, yang siap bertugas di lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan negara dan di tengah-tengah masyarakat.

Jantung pertahanan sebuah partai terletak pada loyalitas dan integritas para anggotanya. Tidaklah mudah membangun loyalitas dan integritas kader sebuah partai. Sedikitnya ada lima langkah dalam membangun loyalitas dan integritas kader partai, yaitu : *pertama* adalah menanamkan ideologi partai secara rapi dan mendalam. *Kedua* adalah

membangun dukungan secara penuh kepada anggota/kader dalam setiap

kegiatan partai (baik secara moril maupun spiritual). *Ketiga* adalah membentuk jaringan anggota/kader yang representatif. *Keempat* adalah menyelenggarakan program pembinaan anggota/kader secara terpadu, merata dan berkelanjutan. *Kelima* adalah memberdayakan anggota/kader secara optimal di tengah-tengah masyarakat.²²

3. Bentuk dan Jenjang Pelatihan

Kegiatan inti dari usaha pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan dan pelatihan. Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich (1995) sebagai “*usaha meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera*”. Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yang diuraikan dibawah ini :²³

- a. *Pelatihan (training)* adalah “sebuah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu karyawan untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.
- b. *Program pelatihan formal* adalah “usaha yang dilakukan oleh majikan (organisasi/perusahaan) untuk memberi kesempatan kepada karyawan

²² Di tulis oleh Fajar, *Membangun dan Integritas Kader Partai*, www.google.com, diakses tanggal 15 Juni 2008.

²³ Dr. H. Achmad S Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas : Mengubah Visi Menjadi Realitas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 220-221

agar menguasai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan”.

- c. *Belajar (learning)* adalah “tindakan yang dilakukan oleh pihak karyawan dalam usaha menguasai keterampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu yang mengakibatkan perubahan yang relatif bersifat permanen dalam perilaku kerja mereka”.
- d. *Keterampilan (skill)* adalah “setiap perilaku kerja yang telah dipelajari”. Oleh karena itu, yang harus dicapai melalui pelatihan adalah peningkatan keterampilan yang diperlukan. Keterampilan yang biasanya menjadi target-target pelatihan adalah keterampilan yang bersifat motorik (menggunakan organ tubuh terutama tangan), kognitif (kemampuan menggunakan daya nalar atau analisis), dan verbal (menggunakan mulut atau berkomunikasi) yang juga disebut keterampilan “interpersonal”.

4. Prinsip Dasar Bagi Pelatihan

Bedasarkan pengalaman dan penelitian para ahli, ada beberapa prinsip pelatihan, antara lain apa yang dikemukakan oleh Dale Yoder dalam bukunya *Personal Principles and Policies*, yakni ada sembilan prinsip pelatihan sebagai berikut :

- a. *Individual Differences*

Tiap-tiap individu mempunyai ciri-ciri khas berbeda satu sama lain,

tiap-tiap individu mempunyai sifat, tingkah lakunya, bentuk kondisinya, maupun

b. Relations To Job Analysis

Analisis jabatan mempunyai tugas utama untuk memberikan pengertian akan tugas yang harus dilaksanakan di dalam suatu pekerjaan.

c. Motivation

Motivation adalah suatu usaha menimbulkan dorongan untuk melaksanakan suatu tugas.

d. Active Participation

Di dalam melaksanakan pendidikan training (latihan) para pegawai atau peserta harus turut aktif mengambil bagian di dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai pelajaran yang diberikan.

e. Selection Of Trainees

Latihan sebaiknya diberikan kepada mereka-mereka yang berminat dan menunjukkan bakat untuk dapat mengikuti latihan itu dengan berhasil.

f. Selection Trainer

Tidak setiap orang dapat menjadi seorang pelatih.

g. Trainess Training

Pelatihan sebelum disertai tanggung jawab untuk memberikan pekerjaan hendaknya telah mendapatkan pendidikan khusus untuk

h. Training Methods

Suatu latihan akan berhasil tidak hanya tergantung kepada tenaga pelatihnya saja, akan tetapi juga tergantung pada metode yang dipergunakan.

i. Principles Of Learning

Dalam latihan asas/dasar dari ilmu pengetahuan juga harus diperhatikan.²⁴

5. Metode Pelatihan

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian metode terlebih dahulu sebelum menjelaskan tentang metode pelatihan. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Koentjoroningrat bahwa, “Dalam arti sesungguhnya, maka *methods (methodis)* adalah suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka *methode* menyangkut cara kerja yaitu memahami obyek yang menjadi sasaran”.

Sedangkan *methode* pelatihan adalah metode yang dipergunakan dalam melaksanakan pelatihan. Menurut Drs. Moekijat bahwa, “metode latihan itu banyak sekali jumlahnya dan tidak ada satu metode pun yang paling baik dibandingkan dengan metode yang lain”.

Oleh karena itu metode-metode yang digunakan dalam suatu pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan yang diberikan kepada perseorangan atau kelompok. Namun demikian menurut Drs. Manullang

²⁴ Dikutip Martoyo, 1987, hal 64, dalam martina Wulandari, *Fungsi Pelatihan Kerja Dalam*

dikemukakan bahwa dalam garis besarnya metode-metode pelatihan itu dapat digolongkan dalam tiga golongan besar yaitu :

a. Metode Kuliah.

Metode kuliah adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari pelatih kepada peserta pelatihan dalam waktu yang relatif singkat. Metode ini dapat sangat efektif, kurang efektif maupun membosankan peserta. Hal ini tergantung dari pelatih yang memberikan kuliah. Kendati demikian ketiadaan proses belajar aktif dan terbatasnya kesempatan bagi umpan balik mengurangi efektivitas metode ini selain itu biaya relatif murah. Dan ingatan terhadap materi-materi dari cara ini relatif rendah, sehingga kuliah-kuliah harus dilengkapi dengan kesempatan untuk memperaktekan informasi yang diperoleh.

b. Case Method and Incident Method.

Case Method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus untuk dipecahkan dan di analisa. Kasus yang digunakan untuk merangsang topik-topik diskusi dan dari semua jenis seperti simulasi, kasus sederhana atau pun kompleks.

Incident Method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu insiden dalam bentuk laporan tertulis yang pendek, kemudian keterangan selanjutnya dicari oleh peserta sendiri dengan mengajukan pertanyaan kepada pelatih atau seseorang yang telah

untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil keputusan, serta selanjutnya diajukan dan dinilai oleh peserta lain.

Ada persamaan dan perbedaan antara Case Method dan Incident Method. Perbedaannya adalah dalam Case Method peserta diberikan gambaran masalah 80%, sedangkan Incident Method peserta diberikan gambaran 25% saja, selebihnya dicari sendiri oleh peserta.

Kelamahan keduanya sama yaitu :

1. Pemakaian kasus lama kurang baik, karena keadaan terjadinya kasus tersebut berbeda pada saat kasus tersebut diberikan.
2. Tidak segera mengetahui efektivitas dari metode tersebut.

c. *Simulation Method.*

Simulation Method adalah metode dimana para peserta pelatihan memainkan peranan dalam suatu organisasi. Sebagian peserta menjadi pengamat dari peran yang dimainkan peserta lain. Ada tiga jenis metode simulasi yaitu :

1. *Management Game*

Yaitu peserta diminta memainkan peran sebagai manajer dari suatu organisasi tiruan dan kemudian berdasarkan data yang telah disiapkan peserta diminta mengambil keputusan. Dapat juga peserta dibagi dalam beberapa grup, kemudian disediakan keterangan-keterangan, dan grup-grup tersebut harus mengambil keputusan sebelum permainan selesai, kemudian diadakan perbandingan grup mana yang terbaik.

2. *In-Basket Exercise atau In-Tray exercise*

Yaitu peserta dilatih keterampilannya dalam memisahkan mana yang penting dan tidak, kemudian mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat.

3. *Role Playing*

Role Playing digunakan dalam human relation training gunanya adalah untuk pengembangan keahlian human relation.

6. **Evaluasi Pelatihan**

Tujuan dari fase evaluasi adalah menilai apakah pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan.

Bila pelatihan yang telah dilaksanakan dinilai telah mencapai hasil yang diinginkan, pelatihan tersebut dapat dianggap “berhasil guna”. Evaluasi terhadap pelatihan yang benar harus dilakukan dalam empat tahap dan tiap tahapnya mempunyai tujuan dan tolak ukur yang berbeda. Empat tahap dalam evaluasi pelatihan adalah .²⁵

a. Keefektifan Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi jenis ini adalah evaluasi tahap yang pertama dan hanya mengukur bagaimana reaksi peserta pelatihan, kemampuan instruktur, penyelenggaraan pelatihan itu sendiri, dan penilaian mereka tentang yang dipelajari selama pelatihan. Cara yang biasa dilakukan adalah meminta para peserta untuk mengisi kuesioner yang berisi

²⁵ Dr.H. Achmad S Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas : Mengubah Visi Menjadi Realitas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 248-249.

pertanyaan-pertanyaan tentang reaksi dan kesan mereka atas penyelenggaraan pelatihan tersebut. Pertanyaan biasanya berkisar topik-topik yang dibahas apakah bermanfaat atau tidak, kemampuan pengajar dalam melaksanakan pelatihan, dan aspek-aspek penyelenggaraan pelatihan itu sendiri.

b. Penyerapan/Retensi Materi

Tujuan evaluasi tahap ini adalah mengukur sampai sejauh mana materi yang diberikan selama pelatihan telah dipahami, dihayati, dan diingat oleh para peserta. Pengukuran biasanya dilaksanakan dalam bentuk “tes pasca pelatihan” yang dilakukan pada hari-hari terakhir dari pelatihan dan diulangi lagi tiga sampai enam bulan setelah pelatihan selesai.

c. Dampak Dari Pelatihan Pada Perilaku Kerja

Tujuan evaluasi tahap ini adalah mengukur perubahan perilaku kerja yang terjadi setelah mereka mengikuti pelatihan. Apakah perilaku kerja telah berubah seperti yang diharapkan dan berapa besar derajat perubahan tersebut. Evaluasi seperti ini harus dilakukan oleh atasan langsung dari karyawan yang telah mengikuti pelatihan dengan mencatat perubahan-perubahan tersebut.

Evaluasi juga bisa dilaksanakan dengan memintanya dari pelanggan yang dilayani oleh karyawan tersebut atau oleh “pelanggan internal”, yaitu karyawan atau pejabat lain dalam perusahaan yang juga

“... ..”

bagian sumber daya manusia dievaluasi oleh pejabat-pejabat yang dilayaninya.

d. Dampak Pada Kinerja Organisasi

Tujuan dari evaluasi ini adalah mengukur apakah pelatihan-pelatihan yang diberikan telah benar-benar berdampak positif pada kinerja organisasi (perusahaan), baik secara keseluruhan maupun per divisi/direktorat.

Untuk melakukan pengukuran tahap ini diperlukan indikator untuk hasil-hasil pelatihan beruang lingkup organisasional, misalnya kenaikan tingkat produktifitas, kenaikan volume penjualan, pengurangan tingkat kecelakaan kerja, penurunan keluhan pelanggan, dan sebagainya. Pengukuran harus dilakukan oleh pimpinan unit kerja di mana karyawan tersebut bertugas bersama-sama dengan pimpinan bagian sumber daya manusia.

E. Defenisi Konsepsional

Defenisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun defenisi konsepsional yang digunakan adalah:

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

2. Pengkaderan adalah suatu proses atau cara, perbuatan yang mendidik atau membentuk seseorang menjadi orang yang diharapkan mampu memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan.
3. Partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga Negara secara sukarela yang mempunyai tujuan, cita-cita dan orientasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan rincian indikator yang berguna sebagai panduan dalam mengumpulkan data di lapangan. Dalam penelitian tentang Sistem Pelatihan Kader Partai Persatuan Pembangunan, indikatornya adalah:

- *Sistem Pelatihan Kader*
 1. Bentuk Pelatihan.
 2. Metode Pelatihan.
 3. Evaluasi dan Follow Up Pelatihan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek pada saat

2. Data yang Dibutuhkan

Penelitian ini hanya dalam satu periode kepemimpinan saja, yaitu pada tahun 2006-2011 agar pembahasan lebih fokus.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang kompeten dan berpengaruh terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pihak-pihak yang berkompeten ini adalah pihak atau individu yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi didalam DPW PPP D.I.Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai catatan, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, koran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti. Kegunaannya adalah untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang diteliti secara sistematis pada

Dengan observasi masalah yang timbul dapat diketahui, paling tidak akan memperkecil kemungkinan terabaikan data. Teknik ini membantu peneliti menemukan sejumlah data yang terkait dengan sistem pelatihan kader Partai Persatuan Pembangunan.

b. Metode Dekumentasi

Adalah cara pengumpulan data melalui tulisan berupa arsip-arsip, buku, koran/majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen yang digunakan bersumber dari arsip-arsip resmi yang berhubungan dengan pengkaderan Partai Persatuan Pembangunan.

Untuk mendapatkan data yang lebih valid, peneliti berupaya membandingkan data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaludin Rahmad bahwa ancaman validitas seringkali terjadi pada penelitian yang akan menggunakan kuesioner atau wawancara sebab responden sering menjawab tidak jujur”.²⁶

Dalam menguji keabsahan data, dapat digunakan teknik triangulasi, yaitu : “Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, atau lebih jelasnya teknik triangulasi yang paling banyak digunakan dalam

Pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara, dengan dokumen yang berkaitan serta membandingkan isi suatu dokument dengan hasil pengamatan.

c. Metode Wawancara

Yaitu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai secara langsung para responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teknik wawancara (komunikasi) adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden dengan mempergunakan wawancara (interview) sebagai alat pengumpul data.²⁷

5. Tehnik Analisa Data

Tehnik yang dipakai adalah tehnik kualitatif, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik atau matematis serta dengan menggunakan analisa isi agar mendapat jawaban ilmiah, logis dan empirik.

Teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif, yaitu menganalisa permasalahan tanpa menggunakan data statistik atau matematis, serta dengan menganalisa isi agar mendapatkan jawaban yang ilmiah, logis, dan

fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa menggunakan perhitungan statistik.²⁸

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis pada terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir formal dan argumentatif.²⁹

Teknik analisa data merupakan proses mengatur data kedalam sebuah satuan uraian yang bertujuan dapat dijelaskan data dan variable dalam penelitian secara sistematis. dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini serta perilaku yang dapat diamati.

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah analisa deskriptif yang diperoleh dari pengklarifikasian data yang kemudian digambarkan melalui susunan kalimat untuk memperoleh kesimpulan, selanjutnya adalah menganalisa sesuai dengan gejala obyek yang diteliti kemudian menginterpretasikan data dan dasar teori yang ada serta. Data diperoleh

²⁸ Noeng Muhadjir, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hal 71.

melalui naskah tertulis, wawancara, catatan laporan, dokumen resmi,
dokumen pribadi untuk keabsahan dalam penelitian